

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pada hakikatnya tujuan pembangunan adalah untuk mencapai keadilan sosial. Pembangunan merupakan metode proses yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam sikap masyarakat, struktur sosial dan lembaga nasional serta penurunan ketimpangan, percepatan kemajuan dan penanggulangan kemiskinan (Smith dan Todaro, 2011).

Bagi bangsa Indonesia tujuan pembangunan dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea empat yang menyatakan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan suatu bangsa membutuhkan aspek pokok yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Aspek sumber daya alam merupakan aset yang dimiliki suatu negara seperti seperti kesuburan tanah, hasil hutan, hasil laut dan tambang yang dapat mempengaruhi pembangunan. Allah SWT menyediakan alam semesta ini untuk dimanfaatkan dengan baik sebagai sarana dan modal dasar untuk pembangunan yang terkandung dalam QS. Al - Jatsiyah ayat 13 :

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : Dan dia menundukkan apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang - orang yang berpikir.*

Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) mengemukakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pasal tersebut menegaskan bahwa semua potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia digunakan untuk kemakmuran rakyat dan pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan diperlukan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sampai saat ini menjadi permasalahan yang selalu ada di Indonesia, padahal didalam program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SGDs) adalah program dari negara - negara di dunia untuk mewujudkan bumi sebagai tempat yang lebih baik bagi manusia yang bersifat berkelanjutan dengan mengharuskan perumusan dan implementasi kebijakan yang merangkul bagi semua negara.

Pembangunan nasional dan daerah adalah sautu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan perdesaan adalah bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu usaha untuk peningkatan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan dan kualitas sumber daya manusia pedesaan. Pembangunan yang

tepat adalah pembangunan yang dimulai dari tingkat paling bawah didalam pembangunan suatu bangsa yaitu dimulai dari desa.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa menjadi salah satu ujung tombak sebuah kemajuan pembangunan. Hal ini demikian karena desa merupakan suatu daerah apabila dikelola dengan baik mampu menjadi penyumbang potensi sumber daya alam, sumber daya ekonomi sampai sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga diperlukan sebuah pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Subejo dan Narimo (2012, hal.31) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya disengaja dalam merencanakan, mengambil keputusan dan mengelola

sumber daya lokal yang dimiliki untuk memfasilitasi masyarakat lokal melalui networking dan collective action sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, sosial dan ekologi. Maka diperlukan berbagai konsep, strategi dan cara penanganan tersendiri dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan, dikembangkan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu kuatnya masyarakat desa dalam keberdayaan kehidupan dan proses kemajuan desa dengan memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Oleh karena itu Indeks Desa Membangun harus mampu menjangkau semua dimensi kehidupan desa, yakni dimensi sosial, ekonomi dan ekologi yang dapat mendukung pembangunan desa yang lekat dengan budaya dan karakteristik desa yang berkelanjutan.

Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi desa dalam 5 (lima) status, yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Klasifikasi desa dalam 5 (lima) status tersebut untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan sekaligus rekomendasi kebijakan yang diperlukan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui Rencana Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020 – 2024, yaitu menurunkan jumlah desa tertinggal sampai 10.000 desa, meningkatkan jumlah desa berkembang 5000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri menjadi 5500 desa.

Provinsi Jawa Barat sampai saat ini terdapat 5312 desa yang tersebar di kabupaten/kota, pada tahun 2021 desa di Provinsi Jawa Barat terdiri dari 586 desa mandiri, 2102 desa maju, 2606 desa berkembang, 18 desa tertinggal dan 0 desa sangat tertinggal. Dengan kondisi tersebut menempatkan Provinsi Jawa Barat dalam urutan ke enam dalam Indeks Desa Membangun di Indonesia.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang dibentuk pada tahun 1950 atas penghapusan Pemerintah Daerah Karesidenan Banten, Jakarta, Bogor, Priangan dan Cirebon berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah provinsi Jawa Barat sebesar 35.377,76 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan dan 5312 desa.

Provinsi Jawa Barat memiliki penduduk terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 mencapai 49.316.712 jiwa atau 18,40 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Permasalahan Provinsi Jawa Barat seperti laju pertumbuhan ekonomi melambat karena akibat dari adanya pandemi COVID-19, penanggulangan kemiskinan dan penanganan pengangguran belum optimal dan cenderung meningkat, pembangunan sumber daya manusia yang belum optimal, pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat yang masih rendah, oleh karena itu pemerintah daerah menjadikan pembangunan desa sebagai prioritas pembangunan daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 melalui program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa).

Adanya program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) yaitu untuk mewujudkan desa yang mampu memberdayakan masyarakat dan membangun desa melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan sarana prasarana desa.

Masih banyaknya permasalahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Jawa Barat menjadikan Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjabat tahun 2018 – 2023 merumuskan Visi dan Misi kepemimpinan dengan memunculkan program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa), program ini terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) Provinsi Jawa Barat (Studi Deskriptif pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat).

## **1.2. Fokus Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian dan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan dalam pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana perencanaan strategi pemberdayaan masyarakat Desa melalui program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) Provinsi Jawa Barat ?
- 2) Bagaimana pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat Desa melalui program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) Provinsi Jawa Barat ?

- 3) Bagaimana hasil strategi pemberdayaan masyarakat Desa melalui program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) Provinsi Jawa Barat ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui perencanaan strategi pemberdayaan masyarakat Desa melalui program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) Provinsi Jawa Barat.
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat Desa melalui program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) Provinsi Jawa Barat.
- 3) Untuk mengetahui hasil strategi pemberdayaan masyarakat Desa melalui program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) Provinsi Jawa Barat.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1. Secara Akademis**

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu sosial khususnya pengembangan masyarakat dan menjadi literatur bagi para peneliti masalah sosial.

#### **1.4.2. Secara Praktis**

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan serta meningkatkan keilmuan dalam disiplin ilmu yang digeluti khususnya pada ilmu Pengembangan Masyarakat Islam.

2) Bagi Lembaga Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat memicu penelitian yang lebih baik dan menambah literatur khususnya pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

3) Bagi Lembaga atau Dinas

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Provinsi Jawa Barat sebagai sumbangsih pemikiran dalam memberikan masukan dan pertimbangan mengenai perencanaan, pelaksanaan dan hasil strategi pemberdayaan masyarakat desa di Jawa Barat melalui program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan yang akan datang, sehingga lebih bermanfaat untuk masyarakat Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya.

4) Bagi Pembuat Kebijakan dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan atau membuat program mengenai Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat.

5) Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur tambahan dan dapat menjadi bahan referensi, khususnya untuk mengkaji topik yang berkaitan dengan program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.

### **1.5. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, literatur yang penulis temukan dari beberapa sumber mengenai topik penelitian sejenis untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dan sebagai pendukung dalam memperkaya hasil dari penelitian. Adapun hasil penelitian sebelumnya penulis dapatkan yaitu :

- 1) Penelitian yang dilaksanakan oleh Zenal (2020) ditemukan bahwa hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat melalui Gebrak Indonesia adalah sebagai berikut: Pertama, perencanaan pemberdayaan melalui Gebrak Indonesia terdiri dari penentuan desa binaan, survei, *social mapping*, perumusan master plan, dan FGD (*Focus Group Discussion*). Kedua, taktik pemberdayaan masyarakat melalui Gebrak Indonesia adalah pendekatan secara personal dan interpersonal kepada masyarakat dengan tidak memberitahukan identitas sebagai sebuah organisasi. Ketiga, pola pemberdayaan masyarakat melalui Gebrak Indonesia cenderung praktikal dan berfokus untuk memantik kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup dalam kemandirian. Keempat, posisi Gebrak Indonesia dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebagai fasilitator dengan memposisikan masyarakat sebagai subjek pemberdayaan. Kelima, Gebrak Indonesia memiliki perspektif pemberdayaan masyarakat secara *bottom up*. Adapun Indikator kemandirian

masyarakat menurut Gebrak Indonesia adalah dilihat dari tingkat ketergantungan masyarakat terhadap Gebrak Indonesia, serta dilihat dari kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup dalam kemandirian.

- 2) Penelitian yang dilaksanakan oleh Safitri (2020) ditemukan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat melalui *home industry* soun di Desa Manjung Ngawen Klaten diantaranya membuka akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat, aksi sosial kepada masyarakat dan jaringan sosial terhadap masyarakat umum yang ingin tahu tentang *industry soun*. Sedangkan dampak pemberdayaan masyarakat melalui *home industry* terhadap masyarakat Manjung dan sekitarnya dirasa bersifat positif terhadap perubahan ekonomi masyarakat, terbukanya kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan keluarga, serta bersifat negatif limbah terhadap lingkungan sekitar dan perebutan karyawan.
- 3) Penelitian yang dilaksanakan oleh Jovian (2020) ditemukan bahwa dari hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan konsep *smart village* juga dapat dilakukan dengan strategi membangun desa dalam kerangka optimalisasi melalui: perubahan paradigma pihak yang berkepentingan, penguatan basis komunitas, proteksi komunitas, penguatan sumber daya manusia, dan penguatan modal sosial. Dari studi pustaka mengenai pendekatan *smart village* yang ada di dunia dan juga dengan melihat indikator yang digunakan untuk menghitung masyarakat berkelanjutan, terlihat bahwa masing - masing pendekatan memiliki kekuatannya masing-masing. Faktor pendorong dalam melaksanakan konsep *smart village* adalah upaya untuk mensejahterakan

masyarakat dengan konsep *smart city*, dimana hal tersebut mengarah pada kebijakan untuk diimplementasikan dengan meningkatkan perhatiannya pada pembangunan desa. sedangkan faktor penghambat dalam strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui konsep *smart village* adalah sumber daya manusia yang rendah dimana dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang rendah baik dari masyarakatnya atau aparatur pemerintah desanya, selain hal tersebut faktor penghambat lainnya adalah sistem ekonomi yang rendah yang dimana dapat dilihat dari banyaknya pengangguran.

## **1.6. Landasan Penelitian**

### **1.6.1. Landasan Teoritis**

Menurut Marrus (2002, hal.31) mendefinisikan strategi adalah proses penentuan rencana oleh para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Menurut Jatmiko (2003, hal.4) Strategi didefinisikan sebagai suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan - tujuannya, sesuai dengan peluang - peluang dan ancaman - ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal organisasi. Menurut Allison dan Kaye (2004, hal.3) strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh suatu organisasi.

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert. Jr (2005) konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu (1) dari perspektif apa

suatu organisasi ingin dilakukan (intens to do) dan (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (eventually does).

Pemberdayaan masyarakat menurut (Chamber,1995) adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai - nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people centered, participatory, empowerment dan sustainable. Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata - mata memenuhi kebutuhan dasar (basic need) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal (Noor, 2011, hal.88).

Menurut Effendie dalam Ariani (2016, hal.279) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai - nilai sosial. Subejo dan Narimo (2012, hal.31) pemberdayaan masyarakat adalah bentuk upaya disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, mengambil keputusan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui networking dan collective action sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, sosial dan ekologi.

Menurut Wuradji (2009, hal.3) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk mencapai keadilan sosial. Payne (1997, hal.268) menyatakan keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah - langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar.

Suharto (2010, hal.60) menyatakan pemberdayaan adalah proses dan tujuan, dimana sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuatan dan keberdayaan kelompok yang lemah di dalam masyarakat, termasuk individu - individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kehidupannya. Djohani (2014, hal.49) menyatakan pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan kepada pihak yang lemah dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang berkuasa sehingga terjadi keseimbangan.

Menurut Widjaja (2009, hal.3) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Kusnaedi (2006) desa merupakan kumpulan manusia yang menetap dan tumbuh bersama dalam suatu area mempunyai badan pemerintahan yang dikepalai oleh seorang pemimpin desa yang terpilih dan dikukuhkan sendiri, serta memiliki serangkaian regulasi yang ditetapkan sendiri. Menurut Bintarto (2011, hal.4) desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur - unsur fisiografis, sosial,

ekonomis, politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

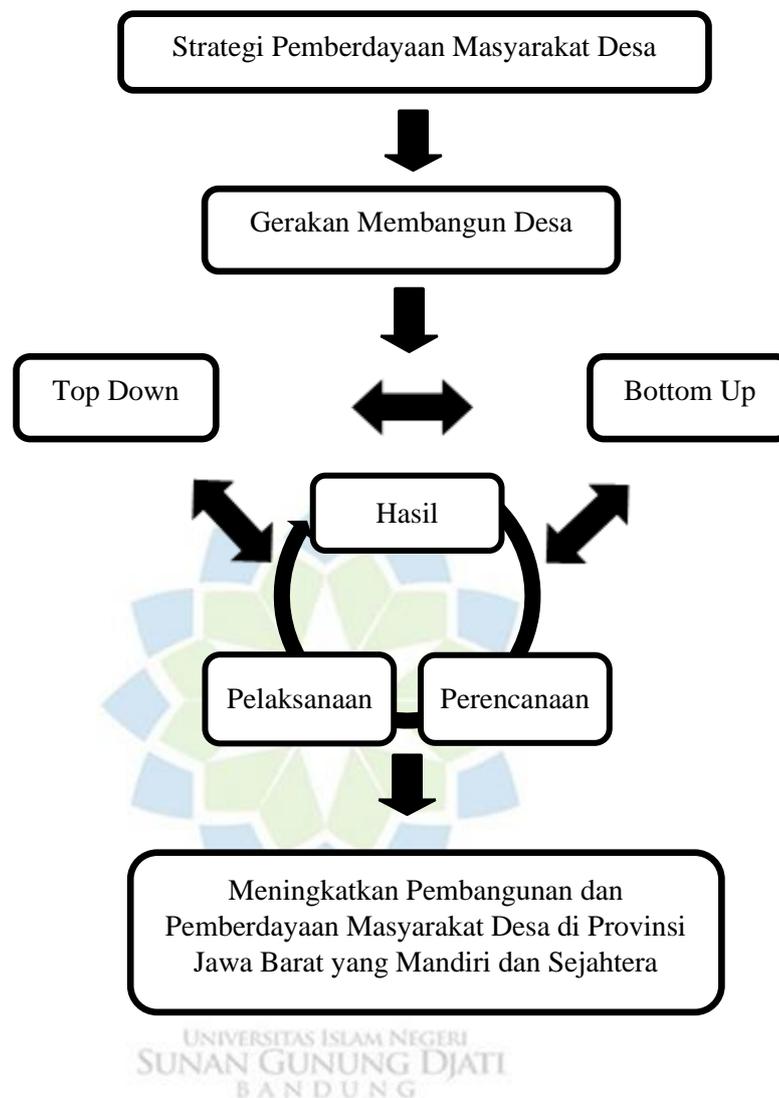
Implementasi kebijakan atau program dikenal dua pendekatan yakni pendekatan *top down* dan *bottom up*. Menurut Nugroho (2011, hal.626) pendekatan *top down* lebih berfokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan secara politik. Agustino (2008, hal.140) mengungkapkan bahwa dalam pendekatan *top down* implementasi yang dilakukan tersentralisasi dan dimulai dari aktor tingkat pusat, serta bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan - keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator - administrator atau birokrat - birokrat pada level bawahnya. Pendekatan *top down* dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang menitikberatkan pada sejauh mana tindakan para pelaksana yang sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah ditentukan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Sedangkan pendekatan *bottom up* memandang implementasi kebijakan tidak dirumuskan oleh lembaga yang tersentralisasi dari pusat. Menurut Agustino (2008, hal.156) pendekatan *bottom up* berpangkal dari keputusan - keputusan yang ditetapkan di level masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang mereka alami.

### **1.6.2. Kerangka Konseptual**

Gambar.1

Skema Kerangka Pemikiran



## 1.7. Langkah – Langkah Penelitian

### 1.7.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Provinsi Jawa Barat yang berada di Jl. Soekarno-Hatta No.466, Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) merupakan salah satu dinas pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi bina desa, kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan potensi desa, yang menjadi kewenangan daerah provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
- 2) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
- 3) Penyelenggaraan administrasi dinas.
- 4) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas.
- 5) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **1.7.2. Paradigma dan Pendekatan**

- 1) Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma ini berpandangan bahwa pengetahuan tidak hanya hasil pengalaman terhadap fakta, tetapi hasil dari konstruksi pemikiran subjek yang diteliti. Pengenalan manusia terhadap realitas sosial berpusat pada subjek dan bukan

pada objek, hal ini berarti bahwa ilmu pengetahuan bukan hasil pengalaman semata, tetapi juga merupakan hasil dari konstruksi oleh pemikiran (Arifin, 2012, hal.140). Peneliti memilih paradigma konstruktivisme karena untuk membantu proses interpretasi dalam menemukan peristiwa yang dikonstruksi dan bagaimana realitas tersebut terbentuk.

## 2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dalam penelitian ini menjelaskan maksud dari makna yang terjadi dibalik realitas. Peneliti mengacu dan melihat pada realitas yang ada dilapangan. Pada penelitian ini memandang apa yang sedang terjadi dalam realitas tersebut dan melekatkan temuan - temuan yang sudah didapatkan didalamnya (Bungin, 2001, hal.82).

### **1.7.3. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena data penelitian yang dikumpulkan merupakan data deskriptif berupa kalimat, data, pernyataan atau informasi dari narasumber atau informan yang dapat menggambarkan fenomena sosial secara lebih sistematis dan utuh pada berbagai penemuan yang sebenarnya.

Metode tersebut menurut Moleong adalah suatu penelitian yang berisi data yang telah didapatkan dan disimpulkan dalam bentuk kata - kata, gambar dan bukan dalam bentuk angka angka (Moleong, 2017). Dengan demikian peneliti akan mendeskripsikan dan menggambarkan secara mendalam mengenai strategi pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Jawa Barat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat .

#### 1.7.4. Jenis dan Sumber Data

##### 1) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif didapat melalui suatu proses yang menggunakan teknik analisis secara mendalam yaitu dengan cara wawancara dan observasi dengan informan yang terkait dalam penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif merupakan prosedur penghasilan data deskriptif berupa kata - kata tertulis maupun lisan dari orang - orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2006).

##### 2) Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder (Purhantara, 2010, hal.79). Sumber data didalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karena itu, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

##### (1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari sumber primer, menurut Sarwono Data yang diambil secara langsung dari sumber primer dengan cara melakukan wawancara dan observasi (Sarwono, 2006, hal.209). Data primer ini berupa keterangan dan fakta yang diperoleh langsung dari sumber data dengan wawancara untuk tujuan penelitian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat sehingga penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya.

##### (2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang sudah tersedia seperti yang sudah dipublikasikan baik itu oleh organisasi, lembaga dan perusahaan (Ruslan, 2017, hal.30). Informasi atau sumber yang diperoleh dapat melalui media - media yang sudah tersedia baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum dengan melalui catatan, jurnal, buku, arsip atau dokumen yang sudah ada. Peneliti dalam hal ini mengumpulkan data dengan cara melihat buku dan jurnal, arsip serta dokumen dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat yang berhubungan dengan penelitian.

#### **1.7.5. Informan atau Unit Analisis**

Informan atau narasumber merupakan orang yang memberikan informasi terkait hal - hal yang ingin kita ketahui mengenai fokus penelitian. Ruslan (2003, hal.18) menjelaskan bahwa tidak ada jumlah sampel minimum pada penelitian kualitatif tidak mengenal batasan informan artinya dapat menggunakan 1, 2, 3, atau lebih sesuai kebutuhan data penelitian. Tetapi penelitian kualitatif pada kasus tertentu hanya menggunakan satu informan yang dirasa akan memberikan informasi yang kredibel karena berkaitan langsung dan mengetahui mengenai permasalahan yang akan diteliti.

##### **1) Informan**

Informan utama yang ditentukan untuk mendapat data primer adalah staff atau pegawai yang mempunyai pengalaman kerja sesuai dengan keahliannya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat dan yang

terlibat dengan strategi pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Jawa Barat melalui program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa).

## 2) Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini yaitu adalah orang yang benar - benar mempunyai informasi yang cukup akurat mengenai permasalahan yang akan diteliti. Kriteria penentuan informan berkaitan langsung dengan perencanaan, pelaksanaan dan hasil dari strategi pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jawa Barat melalui program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa).

### **1.7.6. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang mempunyai kelebihan dalam menggunakan data yang beragam dari sumber yang berbeda - beda. Data tersebut dapat berupa kalimat, rekaman wawancara, arsip, observasi, dokumentasi dan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Agar mendapatkan data yang valid dan kredibel penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1) Wawancara

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*intensive/interview*) merupakan suatu cara mengumpulkan data – data atau informasi dengan informan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam dengan cara langsung bertatap muka (Ardianto, 2014, hal.178). Wawancara yang akan dilakukan kepada Subbagian Perencanaan dan

Pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat.

## 2) Analisis Dokumentasi

Analisis dokumentasi yaitu perolehan dan penelusuran data yang diperlukan melalui data yang sudah tersedia (Hikmat, 2011, hal.83). Analisis dokumentasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data melalui arsip, buku, teori - teori, pendapat, hukum dan lain - lain yang berkaitan dengan penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh dokumentasi mengenai perencanaan, pelaksanaan dan hasil strategi pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Jawa Barat melalui program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa).

## 3) Observasi

Menurut Hadi metode observasi dapat dilakukan secara sistematis terhadap fenomena - fenomena yang diselidiki dengan pengamatan dan pencatatan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi non partisipan. Menurut Moleong, observasi non partisipan dilakukan oleh seorang peneliti hanya melakukan satu fungsi, yaitu dengan mengamati kejadian atau proses yang berkaitan dengan penelitian sesuai dengan pengalaman – pengalaman empiris, keadaan nyata atau dalam pemahaman yang lain. Selanjutnya dalam praktiknya peneliti akan mengadakan pengamatan - pengamatan mengenai pelaksanaan dan hasil strategi pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Jawa Barat melalui program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa).

### **1.7.7. Teknik Penentuan Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah data yang didapatkan yang telah teruji dan valid. Herdiansyah (2010, hal.143) menjelaskan bahwa keabsahan data menjadi parameter sejauh mana sebuah data dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi Teknik. Menurut Bungin (2011, hal.261) triangulasi data merupakan teknik untuk menguji keabsahan data agar data tidak berbeda dan konsisten. Dalam penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data tidak menggunakan dengan alat uji yang bersifat matematis atau statistik tetapi sesuatu dianggap benar apabila kebenaran mewakili kebenaran terbanyak.

#### **1.7.8. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2011, hal.244) mengatakan bahwa analisis data adalah untuk mudah dipahami dan di informasikan kepada orang lain dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan, dokumen dan bahan lainnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh berbentuk kalimat, deskripsi ataupun dokumentasi. Analisis data kualitatif bersifat induktif. Bungin (2005, hal.70) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan induktif adalah analisis berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi sebuah hipotesis.

Adapun langkah – langkah analisis data penulis penulis merumuskan sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data mengenai strategi pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Jawa Barat melalui program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk memperoleh kebenaran dari tiap - tiap sumber dilakukan perbandingan dan penelaahan untuk memudahkan dalam penyesuaian dengan masalah penelitian.

#### 2) Reduksi Data

Reduksi data merupakan data kasar dari penelitian melalui proses pemilihan, pemusatan, pengabstrakan dan pentransformasian data kasar dari penelitian. Reduksi data yaitu hasil pengumpulan data yang dikelompokkan dengan pembahasan agar lebih mudah dalam proses penyajiannya serta dinarasikan secara sederhana dengan memilih hal - hal yang sejenis. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal hingga periode akhir penelitian.

#### 3) Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan sekumpulan informasi telah melalui tahap reduksi data yang memungkinkan penarikan simpulan dan pengambilan tindakan menjadi suatu pernyataan. Data kualitatif diklasifikasikan menurut kebutuhan dan isu analisis kemudian disajikan oleh peneliti dalam bentuk teks naratif. Pada tahap ini proses menyusun data yang relevan sehingga memiliki makna tertentu dan menjadi informasi yang dapat disimpulkan.

#### 4) Pengambilan Kesimpulan

Tahap yang terakhir dalam teknik analisis data adalah pengambilan kesimpulan, yaitu proses penarikan hasil akhir dari semua proses atau tahapan yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan tidak selamanya akan memiliki kesimpulan yang sama setiap waktunya, akan tetapi kesimpulan dapat berubah apabila ditemukan data yang kuat dan mendukung untuk melakukan proses pengumpulan data berikutnya. Peneliti membuat sebuah kesimpulan berdasarkan sebuah data yang sudah diproses melalui tahap pertama dan kedua yaitu reduksi data dan penyajian data.

